



The 1st Sumateranomics

*Prosiding
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara
Bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah Sumatera Utara
p-ISSN:, e-ISSN:*

**PENGARUH NILAI TUKAR PETANI DAN KEBIJAKAN FISKAL
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN
DI PULAU SUMATERA
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEMISKINAN MONETER
DAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI)**

ABSTRACT

The Covid-19 has reduced the pace of the national economy, including on Sumatera Island. The resulting domino effect is the increasing number of poor people, especially those focused on the agricultural sector in rural areas. The effort to overcome this problem, an effective and efficient policy strategy framework is needed. Therefore, this study aims to analyze the effect of Farmer Exchange Rates, the realization of Social Assistance, and Village Budget on the alleviation of monetary poverty and multidimensional poverty in Sumatera Island. This study's analytical method is a panel regression analysis of 10 provinces on Sumatera with the data period from 2015-2018. This study finds that the Farmer Exchange Rate, the realization of Government Spending for Social Assistance, and the Village Budget realization are proven to influence the number of poor people in this region. The government can take some policies to solve this poverty. First, stabilizing agricultural commodity prices through trade between provinces and rescheduling farming schedules. Second, giving additional focus to long-term social assistance programs and ensuring the accuracy of program recipients' targets. The last, encouraging the realization of the Village Budget, especially for community empowerment-based.

Keywords: Poverty alleviation; Fiscal policy; Welfare.

I. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian global dan juga perekonomian nasional. Pada triwulan I 2020 ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen (yoy) atau melambat dibanding periode yang sama di 2019 yang mencapai 5,07 persen (BPS, 2020a). Bahkan pada triwulan II 2020 perekonomian nasional mengalami kontraksi 5,32 persen (BPS, 2020c). Hal tersebut diakibatkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang memaksa beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan, konstruksi, transportasi hingga lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel dan restoran mengalami penurunan aktivitas.

Perlambatan perekonomian memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan hidup pekerja di beberapa sektor seperti transportasi dan konstruksi (World Bank, 2020). Tenaga kerja pada kedua sektor tersebut tercatat mengalami penurunan pendapatan yang besar akibat adanya kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan tanpa pendapatan.

Pada masa awal pandemi Maret 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 26,42 juta jiwa atau meningkat sekitar 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019 (BPS, 2020b). Berlakunya PSBB pada 10 April 2020 di Jakarta dan selanjutnya diikuti wilayah lain yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi yang memukul sumber pendapatan masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan riset yang dilakukan Panel Ilmu Sosial LIPI di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sekitar 44 persen responden kehilangan sebagian besar pendapatan dan 17 persen responden bahkan kehilangan pekerjaan akibat dari penerapan PSBB (Hidayati et al., 2020).

Dengan kondisi saat ini dan menggunakan skenario tanpa intervensi kebijakan pemerintah, penambahan penduduk miskin akibat pandemi di Indonesia diperkirakan mencapai 5,5 hingga 8 juta jiwa (World Bank, 2020). Sehingga upaya pemerintah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat guna menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi menjadi krusial.

Meskipun penyebaran Covid-19 dan pemberlakuan PSBB tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia, namun dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetap terasa di seluruh Indonesia (Muhyiddin, 2020). Perlambatan perekonomian juga terjadi di Pulau Sumatera, pada triwulan I 2020 aktivitas ekonomi di pulau ini hanya tumbuh 3,25 persen (yoy) atau melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 4,55 persen. Bahkan jika dibandingkan triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera mengalami kontraksi sebesar 1,85 persen (BPS, 2020a). Hal tersebut memperlihatkan efek pandemi Covid-19 juga menekan aktivitas perekonomian di Pulau Sumatera secara umum.

Perlambatan perekonomian di Sumatera juga berakibat pada penambahan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada awal masa pandemi. Jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada Maret 2020 mencapai 5,84 juta jiwa atau bertambah 65,1 ribu jiwa (BPS, 2020b).

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu butir dalam Prioritas Nasional ke-1 dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 (Sekretariat Kabinet RI, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda utama pemerintah pada tahun 2020. Selain itu, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk juga merupakan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia (Bappenas, 2017). Dalam salah satu targetnya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

BPS mengukur kemiskinan makro di Indonesia dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (BPS, 2019). Selanjutnya kemiskinan ini sering disebut juga kemiskinan moneter.

Upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang mampu menekan kemiskinan di semua dimensi. Pendekatan kemiskinan moneter hanya memotret sebagian kecil dari besarnya persoalan kemiskinan (Sen, 1999). Konsep kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses perekonomian (Sen, 1982, 1999).

Perkumpulan Prakarsa sejak 2012 sudah mengukur Indeks Kemiskinan Multidimensi di berbagai Provinsi di Indonesia. Mereka mengukur kemiskinan multidimensi di Indonesia didasarkan pada 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup (Budiantoro et al., 2013). Definisi yang lebih luas mengenai kemiskinan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan di semua dimensi.

Permasalahan lonjakan kemiskinan di Pulau Sumatera menjadi isu yang sangat penting ditengah perlambatan perekonomian. Upaya mitigasi lonjakan penduduk miskin membutuhkan informasi mengenai karakteristik kemiskinan itu sendiri, baik kemiskinan secara moneter maupun multidimensi. Karakteristik keduanya perlu diidentifikasi untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi kemiskinan dan penanganannya di Sumatera.

Salah satu kebijakan yang dilakukan dilakukan untuk penanggulangan dampak pandemi adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN mencakup perlindungan sosial dengan kucuran dana sebesar 203,9 triliun rupiah (Kemenko Ekonomi, 2020) atau menjadi yang terbesar dalam paket program ini. Hal tersebut menunjukkan fokus pemerintah dalam rangka menolong daya beli masyarakat kelas bawah.

Secara umum pemberian bantuan sosial akan mengurangi kemiskinan moneter melalui peningkatan daya beli pada jangka pendek (Harman et al., 2016). Hal tersebut sejalan dengan pergeseran konsep perlindungan yang berfokus pada jangka pendek seperti perlindungan masyarakat terhadap dampak *shock* akibat fenomena alam, ledakan pengangguran, ataupun kematian (Carter et al., 2019). Selanjutnya, Carter et al. (2019) menambahkan bahwa pada jangka panjang, bantuan sosial merupakan instrumen kunci dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, nutrisi, produktivitas serta

kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya pada jangka panjang bantuan sosial juga mampu mengurangi kemiskinan multidimensi dengan pemanfaatan yang tepat.

Kemiskinan di Pulau Sumatera banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Sekitar 63 persen penduduk miskin di Bumi Andalas ada di wilayah pedesaan (BPS, 2020b). Hal tersebut mengindikasikan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini membutuhkan perhatian lebih. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sejalan dengan penelitian Azwardi & Sukanto (2014) yang menemukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berperan secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan periode 2006-2012. Selanjutnya Sari & Abdullah (2017) menemukan bahwa ADD dan Dana Desa juga mampu menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung 2015-2016. Sedangkan Astuti (2013) menemukan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Non Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP), ADD dan PAD berpengaruh negatif sedangkan PNPM Mandiri SPP berpengaruh positif terhadap jumlah kepala rumah tangga miskin di Kabupaten Kebumen. Hal di atas menunjukkan bahwa komponen keuangan desa seperti ADD, Dana Desa, hingga PNPM memiliki pengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk melihat pengaruh yang lebih luas, perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah merangkum berbagai variabel keuangan tersebut.

Besarnya dominasi kemiskinan di pedesaan di Bumi Andalas juga tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sektor pertanian. Sektor pertanian sangat lekat sebagai mata pencaharian masyarakat pedesaan dan kemiskinan karena tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian yang rendah. Sehingga salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian. Rahmawati (2020) menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di 32 provinsi pada 2014-2017. Sementara itu Rozali (2020) menemukan bahwa peningkatan NTP dapat menurunkan angka kemiskinan melalui penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Sumatera Selatan periode 2007-2017.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan terdiri atas Nilai Tukar Petani (NTP), realisasi APBD terhadap belanja Bantuan Sosial, dan APBDes untuk dilihat pengaruhnya terhadap kemiskinan moneter maupun multidimensi di Pulau Sumatera. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan instrumen ketiga variabel tersebut. Sehingga upaya Pemerintah dalam rangka menekan peningkatan penduduk miskin di Sumatera akibat pandemi dapat berjalan efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan dan Pendapatan

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang maupun rumah tangga untuk mengakses berbagai sumber daya ekonomi, memperoleh kebahagiaan, memperoleh penghasilan yang

cukup, serta memiliki kemampuan untuk memastikan kehidupannya dalam kondisi yang baik (Greve, 2008). Dari definisi tersebut, terlihat bahwa pendapatan menjadi salah satu unsur penting penentu kesejahteraan seseorang. Besar kecilnya pendapatan tersebut turut menjadi penyebab jatuhnya seseorang kedalam jurang kemiskinan (Saatci & Akpınar, 2007).

Pada dasarnya, kesejahteraan seseorang maupun rumah tangga dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Namun dari sekian banyak faktor yang ada, salah satu faktor utamanya adalah melemahnya daya beli akibat rendahnya *real income* yang diperoleh (Chaudry & Wimer, 2016). Rendahnya *real income* tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu penurunan nilai upah riil akibat pelemahan nilai tukar mata uang terhadap barang dan jasa atau hilangnya sumber pendapatan akibat kehilangan pekerjaan (Easterly & Fischer, 2001; Saunders, 2002).

Jika dijabarkan lebih lanjut, turunnya pendapatan riil salah satunya diakibatkan oleh naiknya harga-harga komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan rumah tangga itu sendiri (Braumann, 2004). Akibatnya, dengan jumlah pendapatan yang konstan maka kuantitas konsumsi terhadap barang dan jasa akan menurun. Adapun dari aspek hilangnya sumber pendapatan akibat hilangnya pekerjaan utama dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, pembatasan aktivitas ekonomi, perkembangan situasi ekonomi yang tidak menentu, serta kerugian usaha tanpa adanya alternatif pekerjaan lain yang memadai (Arndt et al., 2020; Bernstein et al., 2019; Gunawan, 2018; Ravn & Sterk, 2017).

Kemiskinan Moneter dan Kemiskinan Multidimensi

Pembahasan isu kesejahteraan sangat erat kaitannya terhadap isu kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena seseorang ataupun rumah tangga berada dibawah level kesejahteraan yang telah ditentukan (Wulandari & Rosfiantika, 2018). Sejauh ini, penghitungan kemiskinan paling populer adalah pendekatan berbasis moneter. Indonesia sendiri melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung perkembangan angka kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan moneter (Sumargo & Simanjuntak, 2019).

Dalam konsep kemiskinan moneter, definisi kemiskinan merujuk kepada ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi karena pendapatan individu tersebut dibawah garis kemiskinan (Bader et al., 2016; Grosh & Glewwe, 2000; Roelen, 2017). Kemiskinan moneter dihitung berdasarkan besaran konsumsi per kapita yang telah menggabungkan berbagai item yang dibeli, pemberian dalam bentuk *cash* dari pihak lain, serta konsumsi yang bersumber dari produksi sendiri (Roelen, 2017).

Pendekatan berbasis moneter memang memiliki daya tarik tersendiri karena kompatibel dengan asumsi terkait maksimisasi utilitas sebagai tujuan akhir konsumsi. Melalui penghitungan kemiskinan berbasis moneter tersebut akan diperoleh besaran pengeluaran konsumsi perorangan maupun rumah tangga. Besaran nilai konsumsi itulah yang mencerminkan nilai atau utilitas marjinal seseorang maupun rumah tangga terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi (Laderchi et al., 2003).

Sementara itu, untuk melengkapi adanya kemiskinan moneter diperlukan pendekatan lain yang lebih komprehensif, yaitu kemiskinan multidimensi. Dalam kemiskinan multidimensi, pendekatan kemiskinan jauh lebih luas karena memperhitungkan aspek lain yang dianggap relevan dalam mendukung kesejahteraan suatu rumah tangga (Bader et al., 2016; Roelen, 2017). Hal ini didasari pada kerangka pikir bahwa kemiskinan sebenarnya tidak sebatas pada aspek pendapatan saja, melainkan bersifat multidimensi (Bourguignon, 2003). Diantara beberapa aspek yang relevan dalam menjabarkan fenomena kemiskinan yaitu: kesehatan, pendidikan, pangan, pengetahuan, pendapatan, sandang, perumahan, dan beberapa hal lainnya (Asselin, 2009; Philip & Rayhan, 2004; Saatci & Akpınar, 2007).

Kemiskinan multidimensi merupakan sebuah gagasan baru yang menekankan bahwa penentuan status kemiskinan seseorang bukan hanya berdasarkan pendapatan, melainkan juga berdasarkan sejumlah indikator lain yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Alkire & Foster, 2011a, 2011b; Alkire & Santos, 2014; Park & Nam, 2020; Pasha, 2017; Tran et al., 2015). Dengan menggunakan kemiskinan multidimensi ini, maka penargetan kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif. Hal itu karena kemiskinan multidimensi mampu meningkatkan visibilitas kelompok rumah tangga yang awalnya menurut konsep kemiskinan moneter tidak miskin, padahal sebenarnya individu tersebut miskin (Bader et al., 2016).

Di Indonesia, penghitungan kemiskinan multidimensi telah dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa. Dimensi pengukurannya juga mengacu kepada Alkire & Foster (2011b) dengan dilakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang digunakan. Dimensi pertama yaitu kesehatan yang mengukur aksesibilitas terhadap kesehatan dasar yang tercermin melalui sanitasi, air minum layak, dan pemenuhan gizi balita. Sedangkan dimensi pendidikan memperlihatkan kemampuan seseorang dalam mengakses pendidikan diukur melalui pendidikan pra sekolah dan keberlanjutan sekolah. Adapun dimensi ketiga yaitu standar hidup yang menggambarkan pola kehidupan keseharian dari rumah tangga diukur melalui indikator sumber penerangan, bahan bakar memasak, dan kondisi rumah (Ningrum et al., 2019).

Konsep kemiskinan multidimensi dan kemiskinan moneter memiliki keterkaitan satu sama lain meskipun tidak secara langsung. Penggunaan enam indikator dalam penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia digeneralisasi oleh konsep kemiskinan moneter kedalam bentuk pengeluaran makanan dan non-makanan. Hanya saja, konsep kemiskinan moneter mengabaikan distribusi dan kemampuan transformasi pendapatan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pada ketiga dimensi tersebut. Sehingga aksesibilitas individu terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup tidak tergambarkan secara jelas. Berbeda halnya dengan konsep kemiskinan multidimensi yang menggambarkan secara utuh capaian dari masing-masing dimensi tersebut. Meskipun demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pendapatan memiliki andil dalam mempengaruhi status kemiskinan suatu rumah tangga, baik secara moneter maupun multidimensi.

Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Easterly & Fischer (2001), Saunders (2002), dan Chaudry & Wimer (2016), salah satu faktor utama penyebab kemiskinan rumah tangga adalah hilangnya pendapatan atau menurunnya pendapatan riil, sehingga daya beli rumah tangga tersebut menurun. Untuk menjaga daya beli tersebut, hal yang perlu dilakukan yaitu menjaga tingkat pendapatan riil minimal sama dengan kondisi Kebutuhan Layak Hidup (KLH). Oleh karenanya, variabel eksogen yang relevan dalam mempengaruhi kemiskinan suatu rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan kajian yang dilakukan Braumann (2004) dan Talukdar (2012), kenaikan harga memiliki pengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini terjadi karena kenaikan harga menyebabkan pendapatan seseorang mengalami penurunan nilai tukar riil. Akibatnya, dengan besaran upah yang sama maka individu tersebut tidak lagi mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang sama (Braumann, 2004). Dampak tersebut akan sangat terasa utamanya bagi mereka yang tergolong miskin (Talukdar, 2012).

Berbagai indikator yang mengukur kenaikan harga tersedia di Indonesia, mulai dari inflasi pada level produsen, inflasi perdagangan besar, inflasi konsumen di perkotaan, dan inflasi konsumen di pedesaan. Salah satu indikator yang menggabungkan harga level konsumen (harga yang dibayarkan) dan harga komoditas sumber pendapatan (harga yang diterima) adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Memperhatikan sebaran jumlah penduduk di Sumatera yang didominasi oleh pedesaan serta mempertimbangkan daya tukar komoditas yang diproduksi terhadap komoditas yang dikonsumsi, maka NTP merupakan indikator yang tepat untuk menggambarkan perkembangan harga-harga secara umum di Sumatera (Bappenas & JICA, 2013; Vibriane et al., 2017).

Formulasi terhadap NTP mengacu kepada penghitungan BPS yang dinyatakan sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh petani. Indeks harga yang diterima merupakan agregasi indeks harga terhadap berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani pada lima sektor. Sementara indeks yang dibayarkan merupakan agregasi indeks harga terhadap berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani, baik untuk konsumsi akhir maupun usaha (Bappenas & JICA, 2013).

Berbeda dengan inflasi, NTP telah mengkombinasikan perkembangan harga bukan pada aspek konsumsi saja, melainkan aspek pendapatan. Mengasumsikan bahwa sumber pendapatan tetap, maka nilai NTP dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat secara utuh. Kenaikan NTP dapat dimaknai kedalam dua hal, yaitu kenaikan pendapatan akibat perkembangan harga komoditas yang diproduksi yang meningkat atau kenaikan pendapatan akibat harga komoditas yang dikonsumsi mengalami penurunan. Sehingga kenaikan yang terjadi pada NTP dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat (Setyowati et al., 2018).

2. Realisasi APBD terhadap Bantuan Sosial

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur alokasi *budgeting* di wilayahnya. Salah satu postur belanja tidak langsung yang dapat dianggarkan yaitu belanja untuk bantuan sosial. Tujuan dari keberadaan belanja bantuan sosial tersebut untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ritonga, 2009). Besaran alokasi dana belanja tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, bergantung pada skala prioritas dan kemampuan fiskal masing-masing wilayah tersebut.

Bantuan sosial menjadi salah satu instrumen yang cukup populer bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Di Indonesia sendiri, berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, meliputi: Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Program Kelompok Usaha Bersama, dan lain-lain (TNP2K, 2018). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah memiliki efek positif terhadap pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah (Barrientos, 2019; Haile & Zarazua, 2018). Banyak manfaat yang dapat diterima oleh golongan miskin melalui bantuan sosial, terlebih ketika rumah tangga tersebut kehilangan kepala keluarga. Untuk memastikan agar bantuan sosial tersebut berdampak positif, maka pendistribusian bantuan sosial harus tepat sasaran, baik dari aspek waktu, jenis kebutuhan, maupun ketepatan individu penerima (Rachman & Agustian, 2018).

Dalam penelitian ini, realisasi APBD terhadap bantuan sosial merupakan gabungan realisasi APBD Provinsi maupun realisasi APBD Kabupaten/Kota. Gabungan postur belanja tersebut menggambarkan total anggaran pemerintah daerah di suatu provinsi yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial.

3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang dimiliki oleh setiap desa untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut. Tujuan dari pengelolaan APBDes yaitu membiayai program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan dapat terwujud (Daforsa & Handra, 2019; Nurcholis, 2011).

Kaitannya terhadap pengentasan kemiskinan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes yang efektif dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut (Atmojo et al., 2017; Daforsa & Handra, 2019; Hermawan et al., 2019; Yao, 2007). Hal ini dapat terjadi karena dalam pembelanjanya, APBDes telah mengakomodir kebutuhan warga setempat dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta telah menerapkan rencana pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat (Atmojo et al., 2017; Oktavia & Wihastuti, 2020).

Setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki jumlah desa yang berbeda-beda, sehingga agregat realisasi anggaran APBDes antar provinsi juga akan berbeda. Untuk menghindari bias efektivitas realisasi APBDes terhadap pengentasan kemiskinan, maka indikator yang digunakan adalah rata-rata realisasi APBDes untuk setiap provinsi. Hal ini didasari bahwa penggunaan nilai agregat akan memberikan bias interpretasi, dimana provinsi dengan jumlah realisasi APBDes yang besar belum tentu mencerminkan serapan anggaran yang tinggi, melainkan dapat dipengaruhi oleh jumlah desa yang cukup banyak di provinsi tersebut.

Penelitian Terdahulu

Studi terkait kemiskinan pernah dilakukan oleh Indriani (2019) terhadap kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode 2011-2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi memberikan gambaran profil yang berbeda. Jumlah penduduk miskin multidimensi lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin moneter. Tingginya angka kemiskinan multidimensi disebabkan oleh rendahnya dimensi nutrisi dan kesehatan serta dimensi standar hidup, dan pendidikan.

Terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, Rahmawati (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh NTP terhadap kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia. Studi tersebut mencakup 30 provinsi di Indonesia dengan periode waktu dari tahun 2014-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NTP akan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan jika diiringi dengan kebijakan pro-pemerataan distribusi pendapatan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sutiyo & Maharjan (2011) terhadap data kemiskinan di Indonesia periode 1976-2010. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah mampu menurunkan persentase penduduk miskin dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, besaran penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tergolong lambat, utamanya setelah krisis moneter tahun 1997/1998.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachma, dkk. (2019) yang meneliti tentang pengaruh penggunaan APBDes terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu *Least Square Panel* (PSL) terhadap data triwulanan dari tahun 2015-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa APBDes cukup efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dampak positif dari APBDes akan meningkat ketika penggunaan anggarannya dialokasikan untuk tiga program, yaitu: bantuan modal kerja, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta program-program pembangunan berbasis lokal.

Selain dari keempat penelitian tersebut, terdapat studi yang tidak kalah menarik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh BPS Provinsi DIY & Bappeda Provinsi DIY (2016). Hasil studi yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi DIY terdapat tren penurunan persentase

jumlah penduduk miskin moneter. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin multidimensi justru mengalami penambahan. Tidak sinkronnya tren kedua jenis kemiskinan tersebut akibat gagalnya penduduk dalam mentransformasi jumlah pendapatan yang diperoleh kedalam peningkatan kapabilitas dalam pendidikan, kesehatan maupun standar hidup.

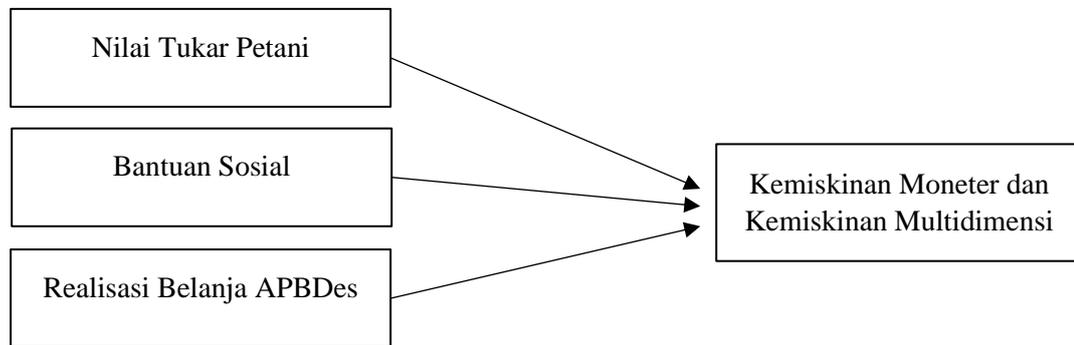
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendekatan kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Sehingga kedua pendekatan kemiskinan tersebut perlu digunakan agar diperoleh gambaran kemiskinan secara komprehensif. Adapun terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, sangat memungkinkan bahwa kemiskinan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel. Dari beberapa penelitian juga diperoleh informasi bahwa NTP, bantuan sosial, dan realisasi APBDes dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut tidak melakukan komparasi untuk menguji efektivitas ketiga variabel eksogen tersebut dalam mempengaruhi kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi. Sangat memungkinkan bahwa signifikansi dan besaran pengaruh setiap variabel akan berbeda ketika jenis kemiskinan yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lain untuk memperoleh variabel-variabel yang efektif dalam mengintervensi jumlah penduduk miskin, baik kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Dalam kemiskinan moneter, pendapatan dan tingkat konsumsi menjadi indikator utama untuk menentukan status kemiskinan suatu rumah tangga. Sementara itu, dalam kemiskinan multidimensi, pendapatan maupun tingkat konsumsi tidak digunakan sebagai pendekatan langsung, melainkan telah dialih wujudkan dalam bentuk kapabilitas lainnya pada dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar hidup. Oleh karena itu, ketika terdapat variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan moneter, mestinya variabel tersebut juga berpengaruh terhadap kemiskinan multidimensi, meskipun besarnya dampak yang ditimbulkan berbeda.

Banyak aspek yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengintervensi kemiskinan, terlebih dalam menghadapi efek pandemi Covid-19. Diantara beberapa alternatif kebijakan yang dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah yaitu dengan menjaga stabilitas harga komoditas, realisasi belanja daerah khususnya untuk bantuan sosial, serta realisasi belanja pada pemerintah tingkat desa. Oleh karena itu, jika divisualisasikan dalam bentuk diagram, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Berpikir



Merujuk kepada ulasan teoritis serta diagram kerangka berpikir, maka dalam penelitian ini disusunlah tiga hipotesis sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif terhadap penambahan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.
2. Realisasi APBD pada belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap penambahan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.
3. Realisasi belanja APBDes berpengaruh negatif terhadap penambahan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian, Variabel, dan Sumber Data

Desain dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan eksplanatori. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terkait kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi di Pulau Sumatera. Sementara itu, desain eksplanatori ditujukan untuk mengetahui pengaruh NTP, realisasi APBD pada Belanja Sosial, serta realisasi APBDes terhadap kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi.

Dalam penelitian ini, provinsi yang dicakup terdiri atas: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Sedangkan rentang data yang digunakan yaitu dari tahun 2015 – 2018. Seluruh data tersebut adalah data sekunder yang bersumber dari Prakarsa dan Badan Pusat Statistik. Secara rinci, tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Rincian Variabel yang Digunakan

No.	Variabel	Satuan	Sumber
1.	Kemiskinan Moneter	Persen	Badan Pusat Statistik
2.	Kemiskinan Multidimensi	Persen	Prakarsa
3.	Nilai Tukar Petani	Persen	Badan Pusat Statistik
4.	Realisasi APBD pada Belanja Bantuan Sosial	Ribu Rupiah	Badan Pusat Statistik
5.	Rata-rata Realisasi Belanja APBDes	Ribu Rupiah	Badan Pusat Statistik

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel, yaitu analisis regresi yang mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* (Gujarati & Porter, 2009). Data *cross section* yang digunakan terdiri atas 10 provinsi di Pulau Sumatera. Sedangkan data *time series* yang digunakan terdiri atas 4 periode, yaitu: 2015, 2016, 2017, dan 2018. Alat statistik yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah Eviews 9.0.

Secara umum, model regresi panel dituliskan sebagai berikut (Greene, 2012):

$$y_{it} = \alpha + x_{it} \beta + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- y_{it} : variabel terikat dari individu ke-i pada periode ke-t
 x_{it} : variabel bebas dari individu ke-i pada periode ke-t
 α : intersep
 β : parameter
 ε_{it} : *error term* dari individu ke-i pada periode ke-t
i : provinsi ke-1 hingga ke-10 (Aceh, ..., Kepulauan Riau)
t : tahun ke-1 hingga ke-4 (2015, ..., 2018)

dimana *error term* (ε_{it}) dapat didekomposisi ke dalam bentuk:

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_{it} \quad (2)$$

dengan u_i merupakan efek individu dan v_{it} merupakan efek sisanya.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan, menurut Hill dkk. (2011) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan estimasi model terbaik dengan menggunakan 3 jenis uji statistik. Secara umum, kemungkinan model yang dapat diperoleh terdiri atas 3 jenis, yaitu:
 - a. Model *common effect* (CEM), merupakan model yang mengasumsikan tidak adanya perbedaan antar individu maupun antar waktu atau dengan kata lain efek tersebut bersifat konstan. Keputusan untuk menentukan model ini didasari atas 2 jenis statistik uji, yaitu uji Chow dan uji LM. Ketika probabilita model pada hasil kedua uji statistik tersebut tidak signifikan, maka CEM merupakan estimasi model terbaik.

- b. Model *fixed effect* (FEM), merupakan model yang mengasumsikan adanya efek yang berbeda antar individu dan bersifat tetap. Perbedaan individu tersebut akan berdampak terhadap perbedaan nilai intersep untuk setiap pemodelan provinsi. Untuk mengambil keputusan bahwa FEM merupakan estimasi model terbaik, diperlukan 2 hasil statistik uji, yaitu uji Hausman dan uji Chow. Ketika probabilita pada hasil uji statistik Hausman dan uji Chow signifikan, maka FEM merupakan estimasi model terbaik.
 - c. Model *random effect* (REM), merupakan model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep pada setiap individu, dimana intersep merupakan variabel random yang mengakomodir perbedaan karakteristik individu dan waktu. Pertimbangan untuk memutuskan REM sebagai model terbaik diperlukan 2 kesimpulan hasil uji statistik, yaitu uji Hausman dan uji LM. Ketika hasil uji Hausman menunjukkan tidak signifikan dan uji LM signifikan, maka REM merupakan estimasi model terbaik.
2. Pengujian asumsi klasik regresi panel yang terdiri atas pengujian asumsi normalitas, homoskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Penggunaan uji asumsi tersebut dimaksudkan agar diperoleh nilai estimator yang *unbiased* dan konsisten. Ketika terdapat pelanggaran pada salah satu asumsi tersebut, maka diperlukan beberapa perlakuan sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2.

Jenis Pelanggaran Asumsi dan Perlakuan

No.	Asumsi yang Dilanggar	Perlakuan
1.	Normalitas	Transformasi data (Chou et al., 1998)
2.	Homoskedastisitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat <i>cross sectional correlation</i>, maka menggunakan metode estimasi <i>Generalized Least Square</i> (GLS) / <i>Weighted Least Square</i> (WLS) (Kantar, 2014). • Terdapat <i>cross sectional correlation</i>, maka menggunakan metode estimasi <i>Estimated Generalized Least Square</i> (EGLS) / <i>Feasible Generalized Least Square</i> (FGLS) with <i>Cross Section SUR / Panel Corrected Standard Errors</i> (PCSE) (Andrikopoulos & Gkountanis, 2011; Moundigbaye et al., 2018).
3.	Non-multikolinearitas	Meninjau kembali terhadap variabel bebas yang digunakan atau menggunakan regresi Ridge (Chen, 2012; Duzan & Shariff, 2016).

No.	Asumsi yang Dilanggar	Perlakuan
4.	Non-autokorelasi	Melakukan transformasi data menggunakan metode Cochran-Orcutt (Magee, 1987).

3. Pengujian kelayakan model regresi yang terdiri atas pengujian simultan (*F test*), uji parsial (*t test*), dan uji kesesuaian model (*goodness of fit test*). Ketiga uji tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh perubahan variabel *independent* terhadap perubahan variabel *dependent*. Model yang baik adalah model yang tidak memerlukan banyak variabel *independent* namun mampu menjelaskan fenomena perubahan pada variabel *dependent* dengan sangat akurat.

IV. HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data maupun proksi kemiskinan yang tepat dan akurat. Pengukuran kemiskinan yang tepat dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang sesuai pada kondisi hidup masyarakat. Dengan melihat angka kemiskinan moneter dapat diketahui persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan dalam kemiskinan multidimensi, sudut pandang mengenai kemiskinan disajikan secara lebih luas. Dimana kemiskinan tidak sebatas dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan tetapi juga dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal.

Tabel 3.
Statistik Deskriptif Data Amatan

Tahun	Kemiskinan Moneter		Kemiskinan Multidimensi		NTP		Realisasi Bansos (Milyar)		Realisasi APBDes (Juta)	
	Mean	STD	Mean	STD	Mean	STD	Mean	STD	Mean	STD
	2015	11,03	4,54	15,47	4,12	98,17	3,47	99,85	140,66	658
2016	10,69	4,46	13,16	3,30	98,25	3,18	71,49	129,62	1.154	384,61
2017	10,45	4,31	10,61	2,57	98,28	3,70	79,30	132,74	1.350	370,08
2018	10,00	3,98	8,76	1,73	96,23	4,85	105,34	195,32	1.401	421,66

Dari hasil pengolahan data kemiskinan dan variabel-variabel eksogen, terlihat bahwa persentase penduduk miskin selama empat tahun terus mengalami penurunan. Berbeda dengan kemiskinan moneter yang hanya mengalami sedikit penurunan selama empat tahun. Kemiskinan multidimensi mengalami penurunan yang sangat tinggi dengan standar deviasi yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan angka kemiskinan multidimensi antar provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2018 tergolong rendah. Jika dilihat berdasarkan provinsi, pada tahun 2018 Provinsi Bangka Belitung memiliki persentase penduduk miskin multidimensi terendah yaitu 6,51 persen dan Sumatera Barat memiliki

persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 12,2 persen. Sedangkan pada kemiskinan moneter Provinsi Aceh memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 15,97 persen dan Provinsi Bangka Belitung kembali menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu 5,25 persen.

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) memperlihatkan adanya fluktuasi. Setelah mengalami kenaikan nilai NTP dari tahun 2015 hingga 2017, rata-rata nilai NTP turun menjadi 96,23 pada tahun 2018. Hal tersebut kurang baik karena NTP merupakan proksi kesejahteraan petani yang menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Ketika nilai NTP lebih dari 100 berarti harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sehingga diharapkan pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. Nilai NTP tertinggi pada tahun 2018 dimiliki oleh Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 105,84. Adapun nilai NTP terendah dimiliki oleh Provinsi Bangka Belitung dengan nilai sebesar 86,88.

Realisasi belanja APBD terhadap bantuan sosial (bansos) juga memperlihatkan adanya fluktuasi. Realisasi bansos tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 105,34 miliar rupiah dan realisasi bansos terendah terjadi pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 71,49 miliar rupiah. Selain itu besarnya standar deviasi mengindikasikan adanya perbedaan yang tinggi dalam realisasi bansos antar provinsi di Pulau Sumatera. Benar saja, pada tahun 2018 realisasi tertinggi belanja bantuan sosial terdapat pada Provinsi Aceh dengan besar realisasi 651,85 miliar rupiah. Di lain sisi Provinsi Bangka Belitung memiliki nilai realisasi bansos sebesar 11,6 miliar rupiah pada tahun 2018.

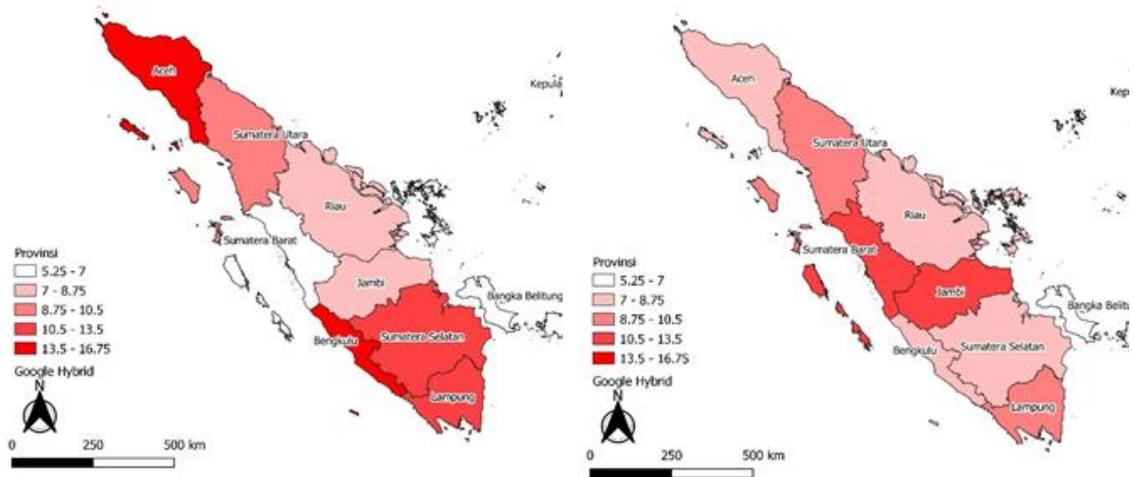
Selanjutnya rata-rata realisasi belanja pemerintah desa di Pulau Sumatera mengalami peningkatan selama periode 2015-2018. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan penyaluran dana desa yang selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2015 hingga 2018 (Kemenkeu, 2017; Sakti, 2019). Dimana Provinsi Aceh memiliki rata-rata belanja pemerintah desa terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 842,95 juta rupiah dan Provinsi Bangka Belitung memiliki rata-rata belanja pemerintah desa tertinggi yaitu sebesar 2,16 miliar rupiah. Kenaikan realisasi belanja pemerintah desa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan persentase penduduk miskin. Mengingat desa saat ini menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.

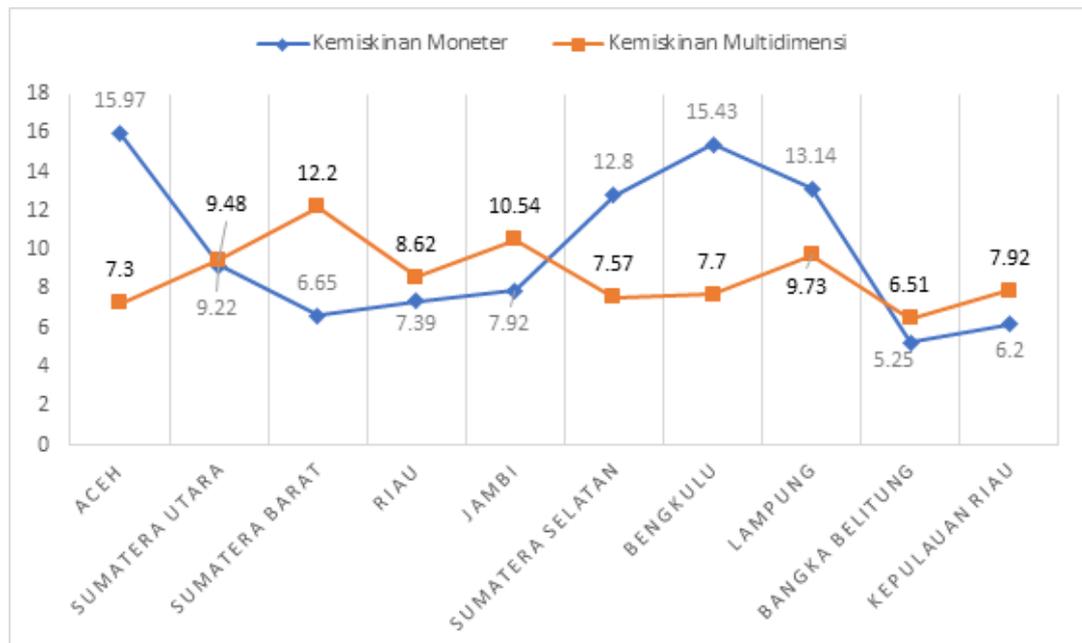
Peta dan Grafik Kemiskinan di Sumatera

(a) Peta Kemiskinan Moneter

(b) Peta Kemiskinan Multidimensi



(c) Grafik Kemiskinan Moneter dan Multidimensi



Secara umum, kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi pada kurun waktu 2015-2018 sama-sama mengalami tren penurunan. Meskipun begitu karakteristik dari kedua proksi kemiskinan tersebut cukup berbeda. Gambar 2 menunjukkan perbedaan angka kemiskinan moneter dan angka kemiskinan multidimensi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2018. Kondisi kemiskinan multidimensi yang lebih rendah dibandingkan kemiskinan moneter mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin jika dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak sudah lebih

baik meskipun memiliki pendapatan yang rendah. Sebaliknya, ketika kemiskinan multidimensi lebih tinggi daripada kemiskinan moneter menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin sudah lebih baik dari sisi ekonomi/pendapatan tetapi pemenuhan hak-hak dasar dari sisi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak masih rendah. Dengan melihat kondisi kemiskinan multidimensi dan kemiskinan moneter, akan membantu pemerintah melihat fenomena kemiskinan yang lebih komprehensif. Sehingga keputusan yang diambil diharapkan mampu menjawab persoalan dengan lebih baik.

Hasil Pengolahan

Pemilihan Model yang Sesuai

1. Uji Kesesuaian antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Tahapan pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengujian kesesuaian model menggunakan uji Chow. Uji tersebut digunakan untuk membandingkan kesesuaian CEM dan FEM. Berdasarkan Uji Statistik Chow dapat dilihat bahwa baik pada model kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sedangkan taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 5 persen, artinya dapat disimpulkan bahwa baik pada model kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

Tabel 4.
Hasil Uji Statistik Chow

Tes Efek	Statistik	d.f.	Prob.
Kemiskinan Moneter			
<i>Cross-section F</i>	241,956861	9,27	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	176,098793	9	0,0000
Kemiskinan Multidimensi			
<i>Cross-section F</i>	16,290924	9,27	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	74,440897	9	0,0000

2. Uji Kesesuaian antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM)

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian kesesuaian antara CEM dan REM menggunakan uji Breusch dan Pagan Lagrangian *multiplier*. Berdasarkan Uji Statistik Breusch and Pagan dapat dilihat bahwa baik pada model kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sedangkan taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 5 persen, artinya dapat disimpulkan bahwa baik pada model kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi model REM lebih baik dibandingkan model CEM.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik Breusch dan Pagan

Ringkasan Hasil Uji	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Kemiskinan Moneter			
<i>Random effects</i>	25,12	3	0,0000
Kemiskinan Multidimensi			
<i>Random effects</i>	22,54	3	0,0000

3. Uji Kesesuaian antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM)

Tahap terakhir yaitu melakukan pengujian kesesuaian antara REM dan FEM menggunakan uji Hausman. Berdasarkan Uji Statistik Hausman dapat dilihat bahwa pada model kemiskinan moneter diperoleh nilai probabilita sebesar 0,0006 dan pada kemiskinan multidimensi diperoleh nilai probabilita 0,1554. Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 5 persen, artinya dapat disimpulkan bahwa baik pada model kemiskinan moneter model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Berbeda halnya untuk model kemiskinan multidimensi dimana model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

Tabel 6.
Hasil Uji Statistik Hausman

Ringkasan Hasil Uji	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Kemiskinan Moneter			
<i>Cross-section random</i>	17,23257	3	0,0006
Kemiskinan Multidimensi			
<i>Cross-section random</i>	5,23520	3	0,1554

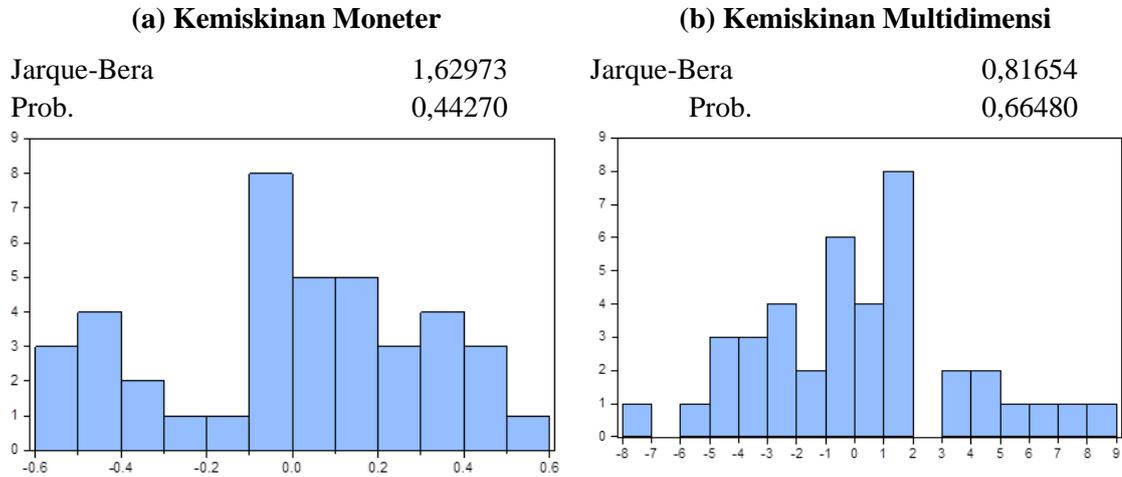
Dari hasil ketiga uji tersebut menunjukkan bahwa pada model kemiskinan moneter model FEM lebih baik digunakan dibandingkan model CEM maupun model REM. Sedangkan pada model kemiskinan multidimensi, model REM lebih baik digunakan dibandingkan model CEM maupun model FEM. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji non-autokorelasi, uji non-multikolinearitas, dan uji homoskedastisitas untuk model FEM.

Uji Asumsi

1. Normalitas

Gambar 3.

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pada model kemiskinan moneter diperoleh skor probabilitas sebesar 0,4427 yang artinya bahwa residual berdistribusi normal. Hal yang sama juga terjadi pada model kemiskinan multidimensi dengan skor probabilitas 0,6648 yang berarti bahwa residual berdistribusi normal.

2. Non Autokorelasi

Uji non autokorelasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan korelasi *error term* antar periode waktu. Ketika data terbebas dari autokorelasi maka penduga parameter menggunakan OLS menjadi *unbiased* dan efisien. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, pada kedua model yang ada diperoleh skor probabilitas Wooldridge test di atas 0,05. Artinya bahwa set data tersebut tidak memiliki korelasi antar *error term*-nya.

Tabel 7.

Hasil Uji Keberadaan Autokorelasi

Ringkasan Hasil Uji	Statistik	d.f.	Prob.
Kemiskinan Moneter			
Tes Wooldridge	3,371	1,9	0,0995
Kemiskinan Multidimensi			
Tes Wooldridge	3,910	1,9	0,0794

3. Non Multikolinearitas

Uji non multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui keberadaan korelasi antar variabel independen. Ketika terjadi multikolinearitas data maka akan menyebabkan penduga OLS dan varians

menjadi tidak tentu. Selain itu, dapat mengakibatkan peneliti terkecoh dengan koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi, padahal semu.

Tabel 8.
Hasil Uji Keberadaan Multikolinearitas

Uji Efek	VIF	1/VIF
Kemiskinan Moneter		
NTP	0,1073	9,32
APBD Bansos	0,6510	1,54
APBDes	0,1263	7,92
Kemiskinan Multidimensi		
NTP	0,1073	9,32
APBD Bansos	0,6510	1,54
APBDes	0,1263	7,92

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh skor VIF (*Variance Inflation Factor*) seluruh variabel dibawah *threshold* yang ditentukan sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari variabel-variabel tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

4. Homoskedastisitas

Uji homoskedastisitas merupakan pengujian asumsi klasik dalam regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Ketika terjadi heteroskedastisitas, maka akan menyebabkan nilai parameter yang dihasilkan menyimpang dari nilai sebenarnya.

Tabel 9.
Hasil Uji Wald Test

	Statistik	d.f.	Prob.
Kemiskinan Moneter			
<i>Wald test</i>	921,91	10	0,0000

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh skor probabilita 0,0000 atau dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa set data tersebut mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga diperlukan alternatif selain OLS yaitu *Fixed Effect Cross Section Weighted Model*.

Tabel 10.
Hasil Uji Cross Sectional Correlation Varian-Kovarian

Breusch-Pagan Test of Independence	
<i>Chi Square</i>	32,615
<i>Degrees of Freedom</i>	6
<i>P-Value > Chi2(6)</i>	0,0000

Setelah itu dilakukan pengujian lanjutan untuk mengetahui keberadaan *cross sectional correlation* pada struktur varian-kovarian residual yang bersifat heteroskedastik. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 10 dan diperoleh nilai probabilita dibawah 0,05. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa struktur varian-kovarian heteroskedastis tersebut mengalami gejala *cross sectional correlation*. Memperhatikan jumlah variabel *cross section* lebih banyak dibandingkan *time series*, maka metode estimasi yang digunakan untuk model kemiskinan moneter adalah metode *cross section* SUR atau PCSE.

Model Akhir yang Terbentuk dan Interpretasi

Tabel 11.
Hasil Pemodelan Akhir

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Kemiskinan Moneter (Kem_Mon)				
Metode: Panel EGLS (<i>Cross-section weight</i>) with <i>Cross-section</i> SUR (PCSE)				
C	16,3355	1,2723	12,8388	0,0000
NTP	-0,0441	0,0115	-3,8344	0,0007
Bansos	-4,19 x 10 ⁻⁹	5,45 x 10 ⁻¹⁰	-7,6937	0,0000
APBDes	-9,73 x 10 ⁻⁷	1,28 x 10 ⁻⁷	-7,5820	0,0000
<i>Sum squared resid</i>	3,6470	<i>Durbin-Watson stat</i>	2,0950	
Statistik Tertimbang				
<i>R-squared</i>	0,9988	<i>F-statistic</i>		1924,215
<i>Adjusted R-squared</i>	0,9983	<i>Prob(F-statistic)</i>		0,000
Statistik Tidak Tertimbang				
<i>R-squared</i>	0,9941	<i>Mean dependent var</i>		10,5435
<i>Sum squared resid</i>	3,9771	<i>Durbin-Watson stat</i>		1,4755
Kemiskinan Multidimensi (Kem_MD)				
Metode: Panel EGLS (<i>Cross-section random effect</i>)				
C	42,5312	9,7610	4,3573	0,0001
NTP	-0,2066	0,0958	-2,1567	0,0378
Bansos	-1,58 x 10 ⁻⁸	5,12 x 10 ⁻⁹	-3,0917	0,0038
APBDes	-7,83 x 10 ⁻⁶	7,93 x 10 ⁻⁷	-9,8730	0,0000
<i>Sum squared resid</i>	88,2190	<i>Durbin-Watson stat</i>		1,4180
Statistik Tertimbang				
<i>R-squared</i>	0,7218	<i>F-statistic</i>		31,1417
<i>Adjusted R-squared</i>	0,6987	<i>Prob(F-statistic)</i>		0,0000
Statistik Tidak Tertimbang				
<i>R-squared</i>	0,1543	<i>Mean dependent var</i>		11,9965
<i>Sum squared resid</i>	503,3842	<i>Durbin-Watson stat</i>		0,2485

Model akhir yang diperoleh telah memenuhi asumsi normalitas, homoskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi yang digunakan dalam regresi data panel. Sehingga model tersebut sudah relevan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan moneter maupun multidimensi di Pulau Sumatera. Model yang terbentuk untuk kedua jenis kemiskinan di Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kemiskinan Moneter} &= (16,3355 + u_i) - 0,0441 \text{ NTP} - (4,19 \times 10^{-9})\text{Bansos} \\ &\quad - (9,73 \times 10^{-7})\text{APBDes} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{Kemiskinan Multidimensi} &= 42,5312 - 0,2066 \text{ NTP} - (1,58 \times 10^{-8})\text{Bansos} \\ &\quad - (7,83 \times 10^{-6})\text{APBDes} \end{aligned} \quad (4)$$

Hasil pengujian *overall test* menggunakan uji F diperoleh nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 sehingga pada tingkat signifikansi lima persen dapat disimpulkan tolak hipotesis nol. Artinya pada tingkat signifikansi lima persen minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, kemiskinan multidimensi maupun kemiskinan moneter. Hasil ini diperkuat dengan nilai *Adjusted R²* yang dihasilkan oleh model. Pada model kemiskinan multidimensi nilai *Adjusted R²* sebesar 0,6987 artinya 69,87 persen keragaman kemiskinan multidimensi dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas. Bahkan pada model kemiskinan moneter memiliki nilai *Adjusted R²* sebesar 0,9983 artinya 99,83 persen keragaman kemiskinan moneter dapat dijelaskan oleh keragaman variabel bebas. Secara parsial, dari tabel 11 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas signifikan berpengaruh terhadap variabel kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi.

Hasil penghitungan pada model kemiskinan moneter menggunakan *fixed effect model* (FEM) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari setiap unit observasi dan perbedaan ini dapat dilihat dari nilai intersepnya. Pada lampiran 1 dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh, Bengkulu dan Lampung merupakan tiga provinsi yang memiliki nilai *cross section fixed effect* tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita asumsikan seluruh variabel bebas dalam penelitian tidak berpengaruh maka ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan moneter yang paling tinggi. Berbeda dengan FEM, pada model kemiskinan multidimensi yang menggunakan *random effect model* (REM) maka diasumsikan bahwa setiap provinsi memiliki perbedaan yang terletak pada galatnya disebabkan karena adanya *cross section random effect*, dimana galat tersebut merupakan variabel random.

Hasil regresi yang terbentuk menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan angka kemiskinan moneter maupun angka kemiskinan multidimensi. Pada model kemiskinan moneter, nilai koefisien regresi sebesar -0,0441 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 poin NTP akan menyebabkan angka kemiskinan moneter turun sebesar 0,0441 persen dengan asumsi variabel lain dalam kondisi tetap. Hal yang sama juga terjadi pada model kemiskinan multidimensi, dengan nilai koefisien regresi -0,2066 berarti bahwa setiap kenaikan 1 poin NTP akan menurunkan angka kemiskinan multidimensi sebesar 0,2066 persen. Sejalan dengan hal

tersebut, kajian yang dilakukan oleh Rahmawati (2000) menyatakan bahwa NTP akan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan jika diiringi dengan kebijakan pro-pemerataan distribusi pendapatan.

Selanjutnya, hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi APBD untuk belanja bansos berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan angka kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi. Dengan nilai koefisien sebesar $-4,19 \times 10^{-9}$ pada model kemiskinan moneter, berarti bahwa setiap kenaikan 100 miliar rupiah bantuan sosial akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan moneter sebesar 0,419 persen dengan asumsi variabel lain dalam kondisi tetap. Begitu juga dengan model angka kemiskinan multidimensi, dengan nilai koefisien sebesar $-1,58 \times 10^{-8}$ berarti bahwa setiap kenaikan 100 miliar rupiah bantuan sosial akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan multidimensi sebesar 1,58 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiyo & Maharjan (2011), yang menyimpulkan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah mampu menurunkan persentase penduduk miskin dari waktu ke waktu.

Terakhir, hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi APBDes berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan angka kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi. Dengan nilai koefisien sebesar $-9,73 \times 10^{-7}$ pada model kemiskinan moneter, berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah realisasi APBDes akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan moneter sebesar 0,973 persen dengan asumsi variabel lain dalam kondisi tetap. Begitu juga dengan model angka kemiskinan multidimensi, dengan nilai koefisien sebesar $-7,83 \times 10^{-6}$ berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah realisasi APBDes akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan multidimensi sebesar 7,83 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachma, dkk (2019), yang menyimpulkan bahwa APBDes cukup efektif untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap Kemiskinan

Secara teoritis kenaikan harga terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan berpengaruh negatif terhadap upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pendapatan riil yang diterima oleh masyarakat (Braumann, 2004). Dampak tersebut semakin terasa utamanya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (Fujii, 2013; Nazima, 2018; Pratikto et al., 2015). Namun demikian, ketika kenaikan harga terjadi pada komoditas produk pertanian, maka pendapatan yang diterima oleh masyarakat di pedesaan akan mengalami kenaikan, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani.

Dalam kasus di Pulau Sumatera, perkembangan harga yang digambarkan oleh NTP berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, baik miskin secara moneter maupun multidimensi. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan NTP cukup efektif untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam banyak kasus, penduduk yang miskin didominasi oleh warga pedesaan

yang berprofesikan sebagai petani. Oleh karena itu, kenaikan skor pada NTP dapat memberikan gambaran bahwa pendapatan petani mengalami perbaikan, sehingga daya beli meningkat.

Pada dasarnya, peningkatan kesejahteraan petani dapat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kesejahteraan petani dapat mengalami kenaikan ketika harga komoditas produk pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan komoditas yang dikonsumsi oleh petani. Kedua, harga jual komoditas pertanian tidak mengalami kenaikan, sedangkan komoditas yang dikonsumsi oleh petani mengalami penurunan harga. Meskipun demikian, skenario paling mungkin terjadi yaitu skenario pertama, dimana harga-harga kedua jenis komoditas baik yang dijual maupun dikonsumsi mengalami kenaikan, hanya saja kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas yang dijual oleh petani.

Dalam tataran kebijakan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu memastikan harga komoditas produk pertanian tidak mengalami penurunan harga secara ekstrem. Dalam beberapa kasus, jatuhnya harga komoditas pertanian terjadi akibat tingginya *supply* komoditas pertanian tanpa diiringi oleh kenaikan *demand* di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga kewajaran pasokan sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendorong petani untuk melakukan ekspor regional terhadap komoditas-komoditas yang mengalami surplus produksi (Susilowati, 2017). Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan yaitu mengedukasi petani untuk mengatur pola tanam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga surplus produksi berlebih pada bulan tertentu dapat dihindari (Anwarudin et al., 2014). Kedua, memastikan bahwa harga-harga komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini dapat ditempuh dengan menjamin kelancaran distribusi barang dari perkotaan atau sentra industri ke wilayah pedesaan melalui sarana transportasi yang memadai (Pahlevi, 2017; Suseno & Astiyah, 2009).

Selanjutnya pada masa pemulihan ekonomi, Bank Indonesia harus mendorong inklusi keuangan utamanya di sektor pertanian yang meliputi edukasi dan aksesibilitas permodalan (Adriani & Wiksuana, 2018). Perkembangan digitilisasi lembaga keuangan dan perkembangan pangsa seperti *financial technology (fintech)* belum dapat diakses secara memadai oleh pelaku usaha pertanian mengingat rendahnya penguasaan teknologi dikalangan petani. Sehingga Bank Indonesia perlu menyusun kebijakan yang mampu mendorong akses pelaku usaha pertanian terhadap perkembangan sistem keuangan terkini agar aksesibilitas terhadap modal meningkat.

Pengaruh Realisasi APBD untuk Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan

Besarnya upaya pemerintah untuk menekan peningkatan penduduk miskin akibat pandemi ditunjukkan dengan dominannya proporsi bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemberian bantuan sosial akan mampu menekan jumlah penduduk miskin secara moneter pada jangka pendek melalui peningkatan daya beli (Bastagli et al., 2016). Sedangkan pada jangka panjang akan mampu menekan jumlah penduduk miskin secara multidimensi melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, nutrisi, produktivitas serta kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat (Carter,

Roelen, Enfield, & Avis, 2019). Hal tersebut tentunya dengan syarat utama bahwa pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran dan tepat waktu (Rachman & Agustian, 2018).

Temuan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Pulau Sumatera, hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial secara signifikan berpengaruh negatif pada persentase penduduk miskin baik moneter maupun multidimensi. Artinya bahwa pemberian bantuan sosial di Bumi Andalas mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada di wilayah ini. Sehingga instrumen bantuan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu alat intervensi kebijakan untuk mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul adalah distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak *update* (Prasojo, Hidayati, Kusumaningrum, Surtiari, & Aini, 2020). Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan komitmen untuk melakukan *update* data penerima bantuan sosial secara berkala, transparan, dan akuntabel.

Pada jangka panjang, rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial harus didorong untuk memiliki daya dukung ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan rumah tangga untuk bisa bersaing dalam perekonomian. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial perlahan mulai berkurang dan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber daya lainnya meningkat. Kebijakan konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah yaitu melalui program bantuan sosial berbasis pelatihan kerja, pendampingan wirausaha, jaminan pendidikan, penjaminan pemenuhan gizi cukup sejak dini, serta jaminan akses layanan kesehatan (Djunawan, 2019; Isnaniah et al., 2015; Sulaeman, 2018; Ustama, 2009).

Pengaruh Realisasi APBDes terhadap Kemiskinan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Desa, tujuan desentralisasi fiskal hingga ke level pedesaan adalah untuk mempercepat proses pembangunan. Hasil studi terhadap penggunaan APBDes di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa secara umum tampak efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, baik secara moneter maupun multidimensi. Hal ini mengkonfirmasi bahwa realisasi belanja APBDes sejauh ini telah memenuhi harapan.

Efektivitas pengelolaan APBDes menjadi cukup penting, mengingat APBDes merupakan salah satu sumber penggerak ekonomi dari sisi *government expenditure*. Arham & Payu (2019) juga mengkonfirmasi bahwa efektivitas *budgeting* yang dilakukan oleh desa terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Meskipun demikian, ternyata tidak serta merta bahwa realisasi belanja APBDes akan berpengaruh positif. Studi lain menunjukkan bahwa APBDes tidak berdampak terhadap pengentasan kemiskinan (Imawan & Purwanto, 2020). Hal ini sangat mungkin terjadi di desa-desa Sumatera jika banyak kepala desa belum memahami sepenuhnya peruntukan dari dana desa tersebut serta teknik tata kelola anggaran secara tepat. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah

daerah level kabupaten/kota untuk memberikan pendampingan dan memastikan agar tata kelola APBDes sudah sesuai dengan rencana pembangunan masing-masing desa.

Selain dari aspek efektivitas tata kelola anggaran, terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa agar serapan anggaran APBDes semakin optimal dalam mendorong proses percepatan pembangunan di pedesaan. Diantara beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemberdayaan masyarakat dan investasi pemerintah desa untuk menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kedua hal tersebut menjadi sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga desa serta sebagai instrumen pemerataan pendapatan.

Pemberdayaan menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan (Atmojo et al., 2017; Calves, 2009). Hal itu karena pemberdayaan melibatkan emansipasi individu ataupun masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam proses membuat keputusan yang penting bagi diri mereka (Luttrell et al., 2009). Masyarakat dapat menganalisis dan merumuskan penyelesaian masalahnya secara mandiri dengan dukungan APBDes sebagai sumber pembiayaan pelaksanaannya (Calves, 2009). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat berbentuk pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh pemerintah di desa tersebut.

Adapun terkait investasi pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes, langkah tersebut dapat memberikan *multiplier effect* ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan desa sekaligus untuk mengembangkan potensi desa setempat (Tomisa & Syafitri, 2020; Zulkarnaen, 2016). Dalam beberapa kasus, BUMDes juga dapat berperan sebagai penyalur produk-produk rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, sehingga dengan adanya BUMDes tersebut maka telah membantu menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat (Agunggunanto et al., 2016).

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan, dengan indikator keberhasilannya adalah persentase penduduk yang hidup dibawah standar hidup layak. Kemiskinan moneter maupun kemiskinan multidimensi, keduanya menggambarkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang dapat mendukung kehidupan mereka secara layak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk dapat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu: Nilai Tukar Petani (NTP), realisasi belanja APBD untuk bantuan sosial, serta realisasi APBDes.

Intervensi yang dilakukan terhadap ketiga variabel tersebut secara statistik terbukti dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, baik secara moneter maupun multidimensi. Dari aspek NTP, meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian sebagai mayoritas mata pencaharian rumah tangga di pedesaan dapat mendorong kapasitas ekonomi masyarakat secara umum. Sementara itu, bantuan sosial memiliki fungsi untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat terbawah. Adanya bantuan sosial akan mendorong kemampuan konsumsi maupun aksesibilitas terhadap sumber daya lain dapat meningkat, sehingga kemiskinanpun menurun. Dari sisi APBDes, pengelolaan yang efektif dan berbasis

pemberdayaan masyarakat akan memperbaiki perekonomian rumah tangga pedesaan. Peningkatan nilai ketiga variabel tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan dan aksesibilitas rumah tangga terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung kebutuhan hidup.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan bersifat makro dengan menggunakan nilai agregat maupun rata-rata dalam setiap variabel. Sementara itu, aspek mikro terkait karakteristik mengenai penduduk miskin belum diteliti lebih jauh dalam penelitian ini. Sangat memungkinkan untuk penelitian selanjutnya perlu melakukan analisis hubungan antar daerah dengan menggunakan analisis geospasial serta menganalisis *behaviour* penduduk miskin.

Saran dan Rekomendasi

Saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera diantaranya dapat melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia perlu memberikan perhatian terkait pengendalian harga-harga komoditas bukan hanya di wilayah perkotaan saja, melainkan juga termasuk harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan usaha pertanian di pedesaan.
2. Bank Indonesia perlu mendorong implementasi keuangan inklusif yang lebih dapat diterima pelaku usaha pertanian yang didominasi oleh penguasaan teknologi rendah.
3. Dinas Industri dan Dinas Pertanian perlu menginisiasi perdagangan antar wilayah untuk menyalurkan komoditas-komoditas pertanian yang mengalami surplus produksi, sehingga *supply* dapat terserap seluruhnya oleh pasar tanpa berdampak terhadap equilibrium produk pertanian di wilayah tersebut.
4. Dinas Pertanian perlu mendorong para petani untuk menata ulang rencana produksi komoditas pertanian, sehingga masa panen dapat menyebar secara merata di setiap periode.
5. Dinas Sosial harus memperbarui dan mengevaluasi daftar penerima bantuan sosial secara berkala agar diperoleh penerima bantuan sosial yang tepat sasaran.
6. Pemerintah Daerah sebaiknya juga memfokuskan dana bantuan sosial untuk pelatihan kerja, pendampingan wirausaha, penjaminan akses pendidikan dan kesehatan, serta penjaminan terhadap pemenuhan kualitas gizi khususnya untuk penduduk Bawah Lima Tahun (BALITA)
7. Pemerintah Daerah perlu mendorong pelaksanaan program padat karya dengan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah desa, kabupaten/kota, maupun provinsi.
8. Pemerintah desa perlu menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan keunggulan wilayah maupun *multiplayer effect* yang dihasilkan bagi perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(12), 6420–6444. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i12.p2>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011a). Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 289–314. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9181-4>
- Alkire, S., & Foster, J. (2011b). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Andrikopoulos, A. A., & Gkountanis, D. C. (2011). Issues and Models in Applied Econometrics: A Partial Survey. *South-Eastern Europe Journal of Economics*, 2(1), 107–165.
- Anwarudin, M. J., Sayekti, A. L., Marendra, A., & Hilman, Y. (2014). Dinamika Produksi dan Volatilitas Harga Cabai: Strategi dan Kebijakan Pengembangan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 8(1), 33–42.
- Arndt, C., Davies, R., Gabriel, S., Harris, L., Makrelov, K., Robinson, S., Levy, S., Simbanegavi, W., van Seventer, D., & Anderson, L. (2020). Covid-19 lockdowns, income distribution, and food security: An analysis for South Africa. *Global Food Security*, 26, 100410. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100410>
- Asselin, L.-M. (2009). *Analysis of Multidimensional Poverty: Theory and Case Studies*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0843-8>
- Astuti, P. B. (2013). Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v12i2.1>
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARIST: Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 126–140.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Bader, C., Bieri, S., Wiesmann, U., & Heinemann, A. (2016). Differences Between Monetary and Multidimensional Poverty in the Lao PDR: Implications for Targeting of Poverty Reduction Policies and Interventions: Differences Between Monetary and Multidimensional Poverty in the Lao PDR. *Poverty & Public Policy*, 8(2), 171–197. <https://doi.org/10.1002/pop4.140>
- Bappenas. (2017). *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas, & JICA. (2013). *Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019*. Bappenas & Japan International Cooperation Agency.
- Barrientos, A. (2019). *The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/WPS190423-2>
- Bernstein, S., Colonnelli, E., Giroud, X., & Iverson, B. (2019). Bankruptcy spillovers. *Journal of Financial Economics*, 133(3), 608–633. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.09.010>

- Bourguignon, F. (2003). The Measurement of Multidimensional Poverty. *The Journal of Economic Inequality*, 1(1), 25–49. <https://doi.org/10.1023/A:1023913831342>
- BPS. (2019). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019* (04340.1902). Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020a). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020* (39/05/Th. XXIII; Berita Resmi Statistik). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>
- BPS. (2020b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* (56/07/Th. XXIII; Berita Resmi Statistik). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- BPS. (2020c). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020* (Pers Rilis No. 64/08/Th. XXIII, 5 Agustus 2020; Berita Resmi Statistik, pp. 1–12). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
- BPS DIY, & Bappeda DIY. (2016). *Laporan Akhir Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di DIY*. Bappeda Provinsi DIY.
- Braumann, B. (2004). High Inflation and Real Wages. *Palgrave Macmillan Journals*, 51(1), 123–147. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/30035866>
- Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. R. P. (2013). *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. <https://repository.theprakarsa.org/publications/667/multidimensional-poverty-index-mpi-konsep-dan-pengukurannya-di-indonesia>
- Calves, A.-E. (2009). Empowerment: The History of a Key Concept in Contemporary Development Discourse. *Revue Tiers Monde*, No 200(4), 735–749.
- Carter, B., Roelen, K., Enfield, S., & Avis, W. (2019). *Social Protection Topic Guide* (Revised). Institute of Development Studies. <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14885>
- Chaudry, A., & Wimer, C. (2016). Poverty is Not Just an Indicator: The Relationship Between Income, Poverty, and Child Well-Being. *Academic Pediatrics*, 16(3), S23–S29. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2015.12.010>
- Chen, G. J. (2012). A Simple Way to Deal with Multicollinearity. *Journal of Applied Statistics*, 39(9), 1893–1909. <https://doi.org/10.1080/02664763.2012.690857>
- Chou, Y.-M., Polansky, A. M., & Mason, R. L. (1998). Transforming Non-Normal Data to Normality in Statistical Process Control. *Journal of Quality Technology*, 30(2), 133–141.
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis of Village Fund Management in Poverty Alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(6), 717–728. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6817>
- Djunawan, A. (2019). Benarkah Subsidi Jaminan Kesehatan Meningkatkan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Primer oleh Penduduk Miskin Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(1), 18–24.
- Duzan, H., & Shariff, N. S. B. M. (2016). Solution to the Multicollinearity Problem by Adding some Constant to the Diagonal. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 15(1), 752–773. <https://doi.org/10.22237/jmasm/1462077360>
- Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160. <https://doi.org/10.2307/2673879>
- Fujii, T. (2013). Impact of food inflation on poverty in the Philippines. *Food Policy*, 39, 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.11.009>
- Greene, W. H. (2012). *Econometrics Analysis* (7th ed.). Prentice Hall.

- Greve, B. (2008). What is Welfare? *Central European Journal of Public Policy*, 2(1), 50–73.
- Grosh, M., & Glewwe, P. (2000). *Designing Household Survey Questionnaires for Developing Countries: Lessons from 15 Years of the Living Standards Measurement Study, Volume 2* [World Bank Publications]. The World Bank.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Gunawan, H. (2018). *Mantan Dirjen Otda: 80 Persen Pemekaran Daerah Gagal* [News]. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/07/mantan-dirjen-otda-80-persen-pemekaran-daerah-gagal>
- Haile, F., & Zarazua, M. N. (2018). Does Social Spending Improve Welfare in Low-income and Middle-income Countries? *Journal of International Development*, 30(3), 367–398. <https://doi.org/10.1002/jid.3326>
- Harman, L., Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Sturge, G., & Barca, V. (2016). Cash Transfers: What Does the Evidence Say? *Overseas Development Institute*, 108.
- Hermawan, A., Istiqomah, & Ahmad, A. A. (2019). *The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island*. 5, 1.
- Hidayati, D., Prasajo, A. P. S., Kusumaningrum, D., Surtiari, G. A. K., & Aini, Y. N. (2020, December 6). *Riset Dampak PSBB: Meski Menerima Bantuan Pemerintah, Warga Hanya Mampu Bertahan Seminggu*. *The Conversation*. <https://theconversation.com/riset-dampak-psbb-meski-menerima-bantuan-pemerintah-warga-hanya-mampu-bertahan-seminggu-140180>
- Hill, R., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2011). *Principles of Econometrics* (4th ed.). John Wiley & Son, Inc.
- Indriani, L. (2019). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Jawa Tengah, 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 10(2), 13. <https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v10i2.72>
- Isnaniah, Perangin, N., & Rizani, A. (2015). Hubungan Status Gizi dengan Perkembangan Fisik Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sebatung Kotabaru Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan*, 6(2).
- Kantar, Y. M. (2014). Generalized Least Squares and Weighted Least Squares Estimation Methods for Distributional Parameters. *REVSTAT: Statistical Journal*, 13(3), 263–282.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020, June 11). *Pemerintah Dorong Skenario New Normal untuk Ciptakan Kondisi Masyarakat Aman dan Produktif Covid-19*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/325/pemerintah-dorong-skenario-new-normal-untuk-ciptakan-kondisi-masyarakat-aman-dan-produktif-covid-19>
- Laderchi, C. R., Saith, R., & Stewart, F. (2003). Does it Matter that we do not Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches. *Oxford Development Studies*, 31(3), 243–274. <https://doi.org/10.1080/1360081032000111698>
- Luttrell, C., Quiroz, S., Scrutton, C., & Bird, K. (2009). Understanding and Operationalising Empowerment. *Overseas Development Institute Working Paper, No. 308*, 1–33.
- Magee, L. (1987). A Note on Cochrane-Orcutt Estimation. *Journal of Econometrics*, 35(2), 211–218. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(87\)90024-8](https://doi.org/10.1016/0304-4076(87)90024-8)
- Moundigbaye, M., Rea, W. S., & Reed, W. R. (2018). Which Panel Data Estimator Should I Use?: A Corrigendum and Extension. *Economics*, 11, 1–31.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Nazima, E. (2018). *Food Inflation and Poverty Nexus: An Empirical Ascertainment*. 1–15.

- Ningrum, D. R., Thariq, R. M., Sagala, M., & Aidha, C. N. (2019). Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan di Indonesia. *PRAKARSA Policy Brief*, 1–4.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund and Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 24(1), 79–94. <https://doi.org/10.22146/jkap.43237>
- Pahlevi, R. (2017). Urgensi Bank Indonesia Mengendalikan Inflasi Melalui Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Park, E.-Y., & Nam, S.-J. (2020). Multidimensional poverty status of householders with disabilities in South Korea. *International Journal of Social Welfare*, 29(1), 41–50. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12401>
- Pasha, A. (2017). Regional Perspectives on the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 94, 268–285. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.013>
- Philip, D., & Rayhan, Md. I. (2004). Vulnerability and Poverty: What are the Causes and How are They Related. *ZEF Bonn, Center for Development Research, Univeristy of Bonn*, 1–22.
- Pratikto, R., Ikhsan, M., & Mahi, B. R. (2015). Unequal Impact of Price Changes in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 61(3), 180–195. <https://doi.org/10.47291/efi.v61i3.511>
- Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). *Government Expenditure, Poverty And Income Inequality In Indonesia: New Evidence From Village Funds*. 8(08), 5.
- Rachman, B., & Agustian, A. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 18. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rahmawati, N. (2020). Pengaruh Kesejahteraan Petani terhadap Kemiskinan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i1.35518>
- Ravn, M. O., & Sterk, V. (2017). Job uncertainty and deep recessions. *Journal of Monetary Economics*, 90, 125–141. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.07.003>
- Ritonga, I. T. (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Roelen, K. (2017). Monetary and Multidimensional Child Poverty: A Contradiction in Terms? : Monetary and Multidimensional Child Poverty. *Development and Change*, 48(3), 502–533. <https://doi.org/10.1111/dech.12306>
- Rozali, M. (2020). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1–16.
- Saatci, E., & Akpınar, E. (2007). Assessing Poverty and Related Factors in Turkey. *Croatian Medical Journal*, 48(5), 628–635.
- Sakti, N. W. (2019, February 25). *Dana Desa Meningkatkan Tiap Tahunnya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-dana-desa-meningkat-tiap-tahunnya/>
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4645>
- Saunders, P. G. (2002). *The Direct and Indirect Effects of Unemployment on Poverty and Inequality*. Social Policy Research Centre.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pub. L. No. 61 (2019). <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/perpres-nomor-61-tahun-2019-tentang-rencana-kerja-pemerintah-tahun-2020#:~:text=Perpres%20Nomor%2061%20Tahun%202019%20Tentang%20Rencana%20Ke rja%20Pemerintah%20Tahun%202020,->

- by%20admin%20%7C%20Sep&text=bahwa%20untuk%20melaksanakan%20ketentuan%20P
asal,Rencana%20Kerja%20Pemerintah%20Tahun%202020.
- Sen, A. (1982). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. OUP Oxford.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
<http://heterodoxnews.com/ajes/readings/Sen1999-intro.pdf>
- Setyowati, I. L., Sasongko, & Noor, I. (2018). Farmer Exchange Rate and Agricultural Land Conversion Analysis to Agricultural Sector Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(1), 35–43. <https://doi.org/10.17977/um002v10i12018p035>
- Sulaeman, M. (2018). Efektifitas Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Banjar). *Jurnal Terapan Abdimas*, 3(1), 28–38.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>
- Suseno, & Astiyah, S. (2009). *Inflasi*. PPSK Bank Indonesia.
- Susilowati, S. H. (2017). Perdagangan Antar Pulau Beras di Provinsi Sulawesi Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), 19–41. <https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.19-41>
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2011). Rural Poverty Alleviation in Indonesia: Programs and the Implementation Gap. *Journal of International Development and Cooperatin*, 18(1), 13–22.
- Talukdar, S. R. (2012). *The Effect of Inflation on Poverty in Developing Countries: A Panel Data Analysis* [Master Thesis]. Texas Tech University.
- TNP2K. (2018). *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu: Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 91–101. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>
- Tran, V. Q., Alkire, S., & Klasen, S. (2015). Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam. *Oxford Poverty & Human Development Initiative Working Paper, No. 97*, 249–281. <https://doi.org/10.1108/S1049-258520150000023008>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *DIALOGUE JIAKP*, 6(1), 1–12.
- Vibriane, E. S., Saenong, Z., & Ernawati. (2017). Korelasi Kebijakan Harga Beras dengan Kesejahteraan Petani di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1115.
- World Bank. (2020, July 16). *Prospek Ekonomi Indonesia, Juli 2020: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi*. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
- Wulandari, K., & Rosfiantika, E. (2018). Poverty Allevation and Community Welfare: A Case Study in Bondowoso Regency, East Java, Indonesia. *Asian Journal for Poverty Studies*, 4(1), 1–6.
- Yao, G. A. (2007). *Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence* [Doctoral Thesis]. Georgia State University.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Efek Individu

No.	Provinsi	Efek Individu	
		Kemiskinan Moneter	Kemiskinan Multidimensi
1	Aceh	7,35795	0,94111
2	Sumatera Utara	-0,64134	-1,58977
3	Sumatera Barat	-3,54106	6,27182
4	Riau	-2,42992	3,19577
5	Jambi	-2,48166	1,07523
6	Sumatera Selatan	2,31662	-4,56631
7	Bengkulu	5,42153	-4,32256
8	Lampung	3,29996	1,18572
9	Bangka Belitung	-5,02169	-0,59980
10	Kepulauan Riau	-4,28039	-1,59122

Lampiran 2. Variabel yang digunakan

Tahun	Provinsi	AK_Mult (%)	AK_Mon (%)	T_Bansos (Ribuan rupiah)	R_APBDes (Ribuan rupiah)	NTP (Poin)
2015	Aceh	13,70	17,08	476.396.159	411.037	96,64
2016	Aceh	11,24	16,73	433.070.257	783.328	96,26
2017	Aceh	8,32	16,89	444.346.054	879.936	94,73
2018	Aceh	7,30	15,97	651.845.266	842.950	94,73
2015	Sumatera Utara	15,13	10,53	113.014.303	367.432	98,61
2016	Sumatera Utara	13,24	10,35	82.895.473	811.842	100,19
2017	Sumatera Utara	11,56	10,22	126.744.435	1.014.876	99,39
2018	Sumatera Utara	9,48	9,22	126.213.597	1.003.742	97,98
2015	Sumatera Barat	23,00	7,31	10.222.926	712.779	97,73
2016	Sumatera Barat	18,37	7,09	9.902.265	1.545.195	97,66
2017	Sumatera Barat	15,00	6,87	19.732.632	1.867.502	96,97
2018	Sumatera Barat	12,20	6,65	48.723.435	1.832.669	95,31
2015	Riau	18,03	8,42	100.699.466	1.097.768	95,23
2016	Riau	14,31	7,98	50.866.280	1.501.417	98,7
2017	Riau	12,44	7,78	51.548.520	1.438.292	102,97
2018	Riau	8,62	7,39	63.695.326	1.643.004	97,97
2015	Jambi	19,24	8,86	40.851.698	618.847	95,43

Tahun	Provinsi	AK_Mult (%)	AK_Mon (%)	T_Bansos (Ribuan rupiah)	R_APBDes (Ribuan rupiah)	NTP (Poin)
2016	Jambi	15,93	8,41	23.957.297	974.381	98,6
2017	Jambi	12,55	8,19	39.130.095	1.328.115	100,78
2018	Jambi	10,54	7,92	34.894.199	1.264.689	99,48
2015	Sumatera Selatan	13,11	14,25	38.015.560	493.606	96,86
2016	Sumatera Selatan	11,87	13,54	8.487.058	901.142	94,58
2017	Sumatera Selatan	8,70	13,19	33.403.829	1.123.169	95,03
2018	Sumatera Selatan	7,57	12,80	19.620.812	1.241.031	93,61
2015	Bengkulu	15,32	17,88	7.590.602	428.255	93,9
2016	Bengkulu	13,52	17,32	3.753.928	840.683	93,06
2017	Bengkulu	10,97	16,45	9.955.550	1.062.712	94,49
2018	Bengkulu	7,70	15,43	12.829.250	1.013.830	94,01
2015	Lampung	17,29	14,35	55.974.014	474.003	103,18
2016	Lampung	16,37	14,29	46.534.713	895.591	103,91
2017	Lampung	11,84	13,69	39.232.875	1.196.061	105,16
2018	Lampung	9,73	13,14	70.585.454	1.290.882	105,84
2015	Bangka Belitung	9,01	5,40	9.484.626	1.153.594	104,71
2016	Bangka Belitung	8,34	5,22	6.964.866	1.813.547	101,41
2017	Bangka Belitung	7,28	5,20	4.331.496	1.977.986	95,78
2018	Bangka Belitung	6,51	5,25	11.603.957	2.157.703	86,88
2015	Kepulauan Riau	10,85	6,24	146.278.784	826.929	99,44
2016	Kepulauan Riau	8,36	5,98	48.491.660	1.481.063	98,15
2017	Kepulauan Riau	7,40	6,06	24.574.145	1.616.888	97,54
2018	Kepulauan Riau	7,92	6,20	13.425.971	1.728.546	96,5